

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah besar yang dihadapi oleh negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%), berkurang sebesar 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64%).

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pada Februari 2017 jumlah angkatan kerja nasional yang jumlahnya lebih dari 131 juta orang ternyata masih didominasi oleh lulusan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Melihat kenyataan masih cukup banyaknya status penduduk Indonesia yang miskin dan hampir miskin, perlu adanya pemecahan atas permasalahan tersebut. Salah satu pemecahan dari masalah tersebut adalah memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada masyarakat melalui jalur pendidikan nonformal. Saat ini banyak bermunculan program pendidikan nonformal berupa pelatihan baik dari pemerintah maupun swasta yang mengarah pada penyiapan tenaga kerja. Program tersebut ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kerja agar memiliki keahlian dengan standar tertentu guna diterjunkan di dunia industri maupun usaha mandiri.

Pelatihan banyak dipilih sebagai salah satu alternatif guna meningkatkan keterampilan masyarakat agar mampu bersaing dalam mencari pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Rentang waktu pelatihan yang relatif lebih singkat dibanding dengan program pendidikan pada pendidikan formal serta dianggap lebih berbasis pada kebutuhan merupakan beberapa alasan mengapa pelatihan dijadikan sebagai salah satu alternatif solusi yang paling menjanjikan guna meningkatkan keterampilan. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Nadler yang dikutip oleh Anwar (2006, hlm. 163) bahwa pelatihan (*training*)

adalah pembelajaran pengembangan individual yang bersifat mendesak karena adanya kebutuhan sekarang. Selain durasi penyelenggaraan pelatihan yang lebih singkat serta berbasis kebutuhan, banyaknya lembaga penyelenggara pelatihan milik pemerintah maupun swasta memberikan pilihan kepada masyarakat yang hendak mengikuti pelatihan.

Salah satu lembaga penyelenggara program pelatihan yang dikelola oleh pemerintah adalah Balai Latihan Kerja (BLK). BLK memiliki program pelatihan yang bertugas menyiapkan tenaga kerja terampil dan siap pakai sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Lembaga ini memiliki program kegiatan yang sistematis dan terencana serta bertujuan untuk menciptakan calon tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang dan kebutuhan dunia kerja. Adapun tugas pokok dari BLK adalah melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk menyelenggarakan sebagian macam latihan keterampilan dalam rangka penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.

Saat ini jumlah BLK yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 301 BLK, yang mana sebanyak 17 BLK merupakan milik pemerintah pusat atau disebut BLK Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) dan selebihnya adalah milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota atau dikenal sebagai BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Meninjau dari tugas pokok BLK yaitu untuk menyediakan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, BLK diharapkan bisa memberikan pelatihan keterampilan serta menyalurkan lulusannya ke dunia kerja. Sehingga dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi pada negara berkembang. Kegiatan pelatihan di BLK disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terikat dengan peraturan yang menyulitkan. Selain itu calon peserta dapat memilih jenis kompetensi yang sesuai dengan keinginan atau kemampuannya tanpa dipungut biaya. Setiap BLK memiliki program keahlian yang berbeda-beda, hal ini disesuaikan dengan minat dan prospek pada daerah tersebut.

Balai Latihan Kerja Lembang berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. BLK Lembang didominasi oleh program-program pertanian, perkebunan, dan peternakan karena menyesuaikan dengan kondisi atau potensi lokal yang ada. Secara umum terdapat enam kelompok program kejuruan yang diselenggarakan oleh BLK Lembang, yaitu program kejuruan pertanian, kejuruan

peternakan, kejuruan perkebunan, kejuruan perikanan, kejuruan hasil pertanian, dan kejuruan mekanisme pertanian. Kemudian dari masing-masing kelompok kejuruan tersebut terdapat beberapa program pelatihan yang lebih spesifik lagi. Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2015, BLK Lembang telah melaksanakan banyak jenis pelatihan dan telah menghasilkan cukup banyak pula lulusan. Beberapa dari mereka bekerja pada sektor-sektor industri dan tidak sedikit pula yang mampu membuka usaha sendiri.

Terdapat tiga jenis program pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Lembang, yaitu Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), Pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU), dan Pelatihan *Tailor Mode* (TM). Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) merupakan pelatihan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu guna meningkatkan kinerja dalam suatu pekerjaan atau jabatan tertentu. Tindak lanjut dari jenis pelatihan ini dilaksanakan melalui *off the job training* maupun *on the job training*. Pelatihan *Mobile Training Unit* (MTU) merupakan pelatihan noninstitusional yang dilaksanakan di luar kantor BLK Lembang dengan menggunakan fasilitas yang telah disiapkan dalam mobil unit pelatihan. Jenis pelatihan ini biasanya dilaksanakan di pelosok desa, daerah terpencil, maupun daerah perbatasan. Pelatihan *Tailor Mode* (TM) merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan mengacu pada pola kerjasama dengan dunia industri sehingga program yang dibuat berdasarkan kebutuhan industri. Perbedaan ketiga jenis pelatihan tersebut didasarkan pada lokasi serta cara penyelenggaraan, sedangkan kurikulum yang digunakan tetaplah sama sesuai dengan bidang kejuruan masing-masing.

Salah satu program pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Lembang adalah program pelatihan pertanian budidaya cabai. Program pelatihan ini merupakan salah satu program baru yang ada di BLK Lembang. Jenis pelatihan yang menjadi fokus kajian merupakan pelatihan *Tailor Mode* (TM) kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan BLK Lembang. Pelatihan ini diselenggarakan guna mempersiapkan para petani cabai yang ada di Kabupaten Siak agar mampu mengelola bantuan dari pemerintah kabupaten di bidang pertanian. Program pelatihan pertanian budidaya cabai dilaksanakan selama 23 hari dan bertempat di Balai Latihan Kerja Lembang.

Balai Latihan Kerja Lembang merupakan salah satu lembaga penyelenggara pelatihan milik pemerintah sehingga penyelenggaraan program pelatihan di BLK Lembang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Seluruh kegiatan pelatihan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan mulai proses persiapan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi program. Sesuai standar tersebut, penyelenggaraan evaluasi program pelatihan di BLK Lembang terdiri dari monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Proses evaluasi program pelatihan di BLK Lembang secara umum dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu penyelenggaraan program. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam satu paket program pelatihan dilakukan sebanyak dua kali evaluasi yaitu pada hari kesepuluh dan pada akhir program. Evaluasi yang dilakukan di BLK Lembang lebih berfokus pada respon atau tanggapan dari peserta program, sehingga beberapa komponen atau aspek pada program kurang diperhatikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BLK Lembang pada periode tahun 2017, diketahui bahwa tingkat kepuasan peserta didik terhadap program pelatihan rata-rata berada pada kategori “puas”. Tingkat kepuasan tersebut bukanlah sebuah jaminan bahwa program telah terlaksana dengan hasil yang memuaskan pula, hal tersebut dikarenakan model evaluasi yang digunakan oleh BLK Lembang belum bisa mencakup keseluruhan komponen program pelatihan.

Evaluasi menurut Kaye Alvarez (2004, hlm. 387) adalah kegiatan mengukur keberhasilan atau kegagalan program pelatihan yang berkenaan dengan konten dan desain, perubahan pada peserta didik, dan dampaknya pada organisasi. Evaluasi biasanya dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen program terhadap tingkat keberhasilan. Komponen-komponen program tersebut dapat berupa dukungan finansial, tersedianya sarana dan prasarana, serta kemampuan atau kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki. Pada penyelenggaraan evaluasi, seorang evaluator dapat memilih model yang sesuai dengan kebutuhan evaluasi serta kemampuan dari evaluator itu sendiri.

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (2007, hlm. 325) model evaluasi merupakan kerangka komprehensif untuk melakukan evaluasi formatif dan sumatif terhadap

program, sumberdaya manusia, produk atau kebijakan, organisasi, dan sistem evaluasi. Model evaluasi CIPP merupakan salah satu model yang paling sering digunakan oleh para evaluator. Model CIPP memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan summatif. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Combs, *et al* (2008) yang menjelaskan bahwa model CIPP digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan dapat memberikan hasil, baik secara formatif maupun sumatif. Model CIPP juga sering digunakan karena memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi, bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap suatu proyek, mulai dari konteks hingga pelaksanaan. Sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan, maupun memberikan informasi final. Nama CIPP merupakan singkatan dari *Context, Input, Process*, dan *Product* yang merupakan empat komponen dari model evaluasi tersebut.

Model evaluasi CIPP dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pada program maupun kebijakan. Cahyono, dkk (2017) menggunakan model CIPP untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *micro teaching*. Model evaluasi ini digunakan untuk mengukur ketercapaian atau tingkat keberhasilan pelaksanaan program *micro teaching* pada salah satu program studi di sebuah universitas yang berada di Solo. Model tersebut dipilih karena dapat lebih rinci dalam menjelaskan seperti apa program tersebut dan bagaimana pelaksanaannya. Penelitian tersebut menghasilkan 8 temuan, yaitu 1) kesiapan pelaksanaan *micro teaching*, tujuan, dan sasaran dalam kondisi yang baik, tetapi ketersediaan jumlah ruang latihan khusus *micro teaching* masih belum begitu baik, 2) kelompok yang dibuat sudah baik dengan jumlah yang ideal yaitu 12-13 mahasiswa per kelompok, 3) sarana prasarana ruang *micro teaching* kurang baik dalam hal perawatan maupun jadwal penggunaan ruangan, 4) sebagian besar penyiapan perangkat pembelajaran mahasiswa sudah baik, 5) pelaksanaan praktik mengajar mahasiswa akan semakin baik jika mahasiswa yang bersangkutan lebih sering berlatih, 6) faktor penghambat pelaksanaan *micro teaching* yaitu jumlah latihan yang didapat mahasiswa masih sedikit, menurut peneliti setidaknya perlu 4 pertemuan sebelum pelaksanaan ujian, 7) kepuasan mahasiswa terhadap penyiapan perangkat pembelajaran termasuk dalam kategori tinggi, dan 8) jika mahasiswa tertib dan sungguh-sungguh dalam

berlatih maka keterampilan mahasiswa dalam mengajar juga akan semakin meningkat.

Studi evaluatif dengan menggunakan model CIPP pernah dilakukan oleh Sukajaya (2010) terhadap pelaksanaan kurikulum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Model CIPP dipilih karena dianggap dapat mencakup keseluruhan komponen program serta sumbangsuhnya terhadap keberhasilan program. Penelitian tersebut menghasilkan 4 temuan, yaitu 1) kesiapan dalam melaksanakan kurikulum TIK tahun 2004 ditinjau dari dukungan sumber daya lokal tergolong masih rendah, 2) mayoritas sekolah telah melakukan upaya-upaya pembentukan nota kesepakatan dengan lembaga mitra untuk menutupi kekurangan sumberdaya lokal guna mengoptimalkan pencapaian standar kompetensi kurikulum TIK tahun 2004, 3) pelaksanaan kurikulum TIK tahun 2004 di masing-masing SMA sudah tergolong baik dengan dibentuknya nota kesepakatan dengan lembaga mitra di samping juga didukung oleh karakteristik materi yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, dan 4) keberhasilan pencapaian standar kompetensi kurikulum TIK tahun 2004 di masing-masing SMA masih terbatas pada pemanfaatan TIK sebagai alat bantu, belum pada pencapaian pemanfaatannya untuk memahami sebuah materi.

Pada program pelatihan, penelitian evaluasi menggunakan model CIPP pernah dilakukan oleh Irwan (2017) yang melakukan studi evaluatif pada program pelatihan pengolahan limbah kertas semen di salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di Kota Binjai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa program pelatihan pengolahan limbah kertas semen dapat dilanjutkan dengan memodifikasi/memperbaiki komponen-komponen program pelatihannya terutama pada komponen produk. Pada aspek konteks, input dan proses yang telah dievaluasi berkategori baik, namun kategori tidak baik hanya terdapat pada aspek produk. Hal tersebut mengindikasikan ada hal yang belum diperhatikan pada aspek produk. Kekurangan yang paling menonjol terletak pada aspek produk yaitu ketidakmampuan penyelenggara program dalam memasarkan hasil-hasil keterampilan peserta pelatihan tersebut.

Model CIPP juga dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu program nonpendidikan dan pelatihan, seperti yang dilakukan oleh Divayana

(2015) yang melakukan studi evaluasi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS dengan menggunakan bantuan komputer. Model tersebut dipilih karena dianggap memiliki komponen yang lengkap, selain itu evaluator juga dapat melakukan evaluasi secara lebih mendalam pada masing-masing komponen evaluasi. Penggunaan komputer pada penelitian evaluatif dapat membantu proses analisis data sehingga diperoleh data yang lebih akurat dengan waktu yang lebih singkat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa dengan menggunakan model evaluasi CIPP berbantuan komputer, dapat diperoleh hasil perhitungan yang lebih cepat dan akurat dibandingkan menggunakan cara perhitungan konvensional. Sehingga para pengambil keputusan dapat lebih cepat membuat rekomendasi dalam pengambilan keputusan terkait keberlangsungan program.

Pelatihan pertanian budidaya cabai merupakan program baru sehingga masih perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaannya. Untuk itu model evaluasi yang mampu mencakup keseluruhan komponen program sangat diperlukan, sehingga sumbangsih dari tiap komponen program terhadap keberhasilan program dapat diketahui. Model evaluasi CIPP banyak digunakan oleh evaluator karena dianggap dapat melakukan evaluasi terhadap keseluruhan komponen program dengan mengelompokkannya dalam empat komponen. Sehingga peneliti memilih model CIPP sebagai model yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program pelatihan budidaya cabai. Berdasarkan pada beberapa informasi tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Model Evaluasi Program CIPP pada Pelatihan Pertanian Budidaya Cabai”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil studi pendahuluan berupa wawancara dengan pengelola program dan beberapa instruktur di Balai Latihan Kerja Lembang diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan pada penyelenggaraan evaluasi program pelatihan, di antaranya adalah 1) model evaluasi yang digunakan oleh Balai Latihan Kerja Lembang lebih menekankan pada tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan program pelatihan, sehingga komponen-komponen program pelatihan yang lain seperti relevansi hasil *training needs assessment*, penggunaan

metode pembelajaran, dan beberapa komponen lainnya kurang diperhatikan. Tingkat kepuasan peserta pelatihan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu program pelatihan, namun beberapa komponen lain juga perlu dijadikan pertimbangan untuk dilakukan evaluasi agar diketahui sumbangsih komponen tersebut terhadap keberhasilan program, 2) kondisi peserta yang heterogen baik dari segi usia, latar belakang pendidikan, maupun latar belakang sosial terkadang menjadi kendala tersendiri bagi instruktur dalam proses pembelajaran, terutama pada pengkondisian peserta pelatihan, 3) evaluasi program pelatihan di Balai Latihan Kerja Lembang menggunakan instrumen tunggal berupa kuesioner yang bertujuan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program pelatihan. Penggunaan instrumen tunggal dalam evaluasi menghasilkan data yang kurang akurat jika dibandingkan dengan penggunaan instrumen tambahan seperti pedoman observasi ataupun wawancara, 4) monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebanyak dua kali dalam satu paket pelatihan. Hal tersebut tentu dirasa kurang mencukupi untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program secara keseluruhan, 5) program pelatihan pertanian budidaya cabai merupakan program baru di Balai Latihan Kerja Lembang, sehingga diperlukan suatu model evaluasi yang mampu melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen program pelatihan secara keseluruhan.

Berdasarkan pada latar belakang dan beberapa temuan permasalahan, peneliti menentukan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu “bagaimana implementasi model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) pada pelatihan pertanian budidaya cabai?”. Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi model evaluasi program CIPP pada pelatihan pertanian budidaya cabai ditinjau dari dimensi *context*?
2. Bagaimana implementasi model evaluasi program CIPP pada pelatihan pertanian budidaya cabai ditinjau dari dimensi *input*?
3. Bagaimana implementasi model evaluasi program CIPP pada pelatihan pertanian budidaya cabai ditinjau dari dimensi *process*?
4. Bagaimana implementasi model evaluasi program CIPP pada pelatihan pertanian budidaya cabai ditinjau dari dimensi *product*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis implementasi model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) pada pelatihan pertanian budidaya cabai. Tujuan penelitian ini secara lebih khusus adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi model evaluasi program CIPP pada pelatihan pertanian budidaya cabai ditinjau dari dimensi *context*.
2. Untuk menganalisis implementasi model evaluasi program CIPP pada pelatihan pertanian budidaya cabai ditinjau dari dimensi *input*.
3. Untuk menganalisis implementasi model evaluasi program CIPP pada pelatihan pertanian budidaya cabai ditinjau dari dimensi *process*.
4. Untuk menganalisis implementasi model evaluasi program CIPP pada pelatihan pertanian budidaya cabai ditinjau dari dimensi *product*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kajian tentang implementasi model evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) pada sebuah program pelatihan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi lembaga, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk kepala lembaga, pengembang program, dan instruktur pelatihan, dalam pelaksanaan program pelatihan selanjutnya. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat ditemukannya komponen-komponen dalam program pelatihan yang berdampak positif maupun negatif terhadap program pelatihan. Setelah dampak dari masing-masing komponen tersebut ditemukan diharapkan muncul sebuah formula rekomendasi sebagai bahan acuan untuk digunakan dalam perbaikan program.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Secara umum mengenai isi dari tesis ini dapat dilihat dalam struktur organisasi penulisan tesis yang mengacu pada pedoman karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 2017. Struktur organisasi penulisan tesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab I menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah yang diteliti, tujuan dari penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan, dan struktur organisasi tesis.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab II berisi teori relevan yang digunakan dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan yaitu penjelasan mengenai konsep pelatihan, konsep evaluasi, model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*), dan kerangka pemikiran.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sub bab yang dijelaskan pada bab ini adalah mengenai metode dan desain penelitian, responden dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV mengemukakan mengenai temuan penelitian dan pembahasan yang dikembangkan berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh. Perolehan tersebut didapat melalui desain penelitian yang dijelaskan pada Bab III. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori yang relevan sebagai penunjang temuan penelitian.

5. Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Pada Bab V dipaparkan kesimpulan dari hasil analisis dan rekomendasi penulis sebagai bentuk pemaknaan terhadap hasil penelitian. Implikasi terkait dengan temuan atau hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Rekomendasi berisikan saran atau masukan kepada beberapa pihak terkait, guna perbaikan program selanjutnya.